

## ANALISIS PENINGKATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO

**Sri Muljaningsih**  
**Prodi Ekonomi Pembangunan FEB-UPNV Jatim**

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan data berkala (*Time Series Data*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang diambil dari tahun 2004-2013, sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis regresi bahwa secara simultan Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak dan Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Secara parsial Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo, berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

*Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Pendapatan Perkapita, dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo.*

### PENDAHULUAN

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Pajak sangat besar artinya, karena perannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. (Syofyan, 2006:30).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2005:1).

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. (Yunita Sari, 2012:30)

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penerimaan dana perimbangan, salah satunya merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau

bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Di samping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah 2005:108).

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. (Fiky Rachmad, 2005:17)

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun data yang diperoleh dari Kabupaten Sidoarjo bahwa target dan realisasi penerimaan PBB selama beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Pada tahun 2009 terdapat target sebesar 72.506.437 juta rupiah dan terealisasi sebesar 73.631.646 juta rupiah, pada tahun 2010 terdapat target sebesar 177.615.905 juta rupiah dan terealisasi 188.759.542 juta rupiah, pada tahun 2011 terdapat target sebesar 142.711.666 juta rupiah dan terealisasi sebesar 148.455.366 juta rupiah, pada tahun 2012 terdapat target sebesar 140.367.125 juta rupiah dan terealisasi sebesar 141.326.978 juta rupiah dan yang terakhir pada tahun 2013 terdapat target sebesar 145.634.848 juta rupiah dan terealisasi sebesar 147.187.993 juta rupiah.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir penerimaan PBB selalu gagal untuk memenuhi target PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran PBB-nya, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Salah satu usaha dari Pemerintah untuk meningkatkan target PBB dilakukan cara pemberian penyuluhan kepada wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, serta meningkatkan kedatangan para petugas pemungut kepada wajib pajak yang menunda pembayaran PBB-nya dan melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut yang ada di lapangan.

Menurut Friedrich dalam Winarno (2007 : 17) dikatakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Sementara mengenai masalah pembayaran PBB sesuai dengan UU No. 12 Tahun pasal 11 tertulis bahwa "pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan". Namun kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk membayar melalui pegawai yang datang ke wilayah masing-masing. Sementara mengenai masalah pembayaran juga belum terimplementasi secara baik sesuai dalam UU No. 12 Tahun 1994 pasal 11 ayat (5) yang tertulis bahwa "pembayaran PBB dilakukan di bank maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh menteri Keuangan". Akan tetapi masyarakat lebih memilih membayar melalui petugas yang datang ke wilayah masing-masing daripada melalui bank atau kantor pos maupun melalui loket pembayaran yang ada di Kecamatan.

Hal ini akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim intensifikasi kecamatan kepada masyarakat tentang mekanisme pembayaran PBB. Serta masih banyaknya ditemukan wajib pajak yang menunggak pajaknya, seperti yang diberitakan dalam harian Jawa Pos, Rabu 24

Februari 2010, bahwa masih banyak ditemukan wajib pajak yang telambat memenuhi kewajibannya. Hal inilah yang mengakibatkan pendapatan yang diperoleh melalui PBB menurun. Masyarakat tidak memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan pembayaran. Sementara itu masih terdapat komunikasi yang belum efektif dan sikap petugas kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek pajak dan objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai pada kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”. (Abunyamin, 2002:34)

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan, maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak, baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

### METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas (X) dan 1 variabel terikat (Y) sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk (X1), jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang melakukan produksi atau konsumsi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Variabel ini dinyatakan dalam satuan jiwa.
- Jumlah Wajib Pajak (X2), jumlah wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak membayar pajak yang ditinjau dari rasio pokok ketetapan dengan pendapatan wajib pokok..
- Pendapatan Perkapita (X3), pendapatan perkapita adalah perbandingan antara besarnya jumlah pendapatan regional atas harga konstan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dinyatakan dalam satuan persen (%).
- Penerimaan PBB (Y), merupakan perbandingan antara pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan ketetapan PBB pada tahun yang bersangkutan.

Penentuan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (*Time Series Data*), yaitu data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu, dari tahun ke tahun selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2004-2013.

Teknik analisa data menggunakan model regresi linier berganda dengan asumsi BLUE (Best Linier Unbiased Estimate) untuk mengetahui koefisiensi pada persamaan tersebut betul-betul linier (tidak bias). Uji hipotesis untuk menguji kesesuaian model persamaan regresi yang dihasilkan digunakan uji f., sedangkan untuk menguji signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan t.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi

#### Pengujian Adanya Pelanggaran Asumsi-Asumsi Klasik

##### 1. Pengujian adanya Multikolinieritas

Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dengan mengamati besarnya VIF, apabila  $VIF < 10$ , maka regresi bebas dari gejala multikolinieritas, sedangkan apabila  $VIF \geq 10$  regresi mengandung adanya gejala multikolinier. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 1. Nilai VIF persamaan  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$**

Varibel	Tolerance	VIF
Jumlah Penduduk (X1)	0,156	6,403
Jumlah Wajib Pajak (X2)	0,220	4,561
Pendapatan Perkapita (X3)	0,150	6,633

**Sumber: Data diolah**

Dari tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas, karena VIF dari setiap variabel bebas  $< 10$ .

## 2. Pengujian adanya Autokorelasi

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan metode Uji Durbin-Watson. Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Banyaknya sampel (N) = 10

b. Banyaknya variabel bebas (k) = 3

c. Taraf atau tingkat signifikansi yang digunakan ( $\alpha$ ) = 0,05

Selanjutnya dilihat pada tabel Durbin Watson d diperoleh DL = 0,525 dan DU 2,016, serta  $4 - DL = 3,475$  dan  $4 - DU = 1,984$ . Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Batas-Batas Daerah Test Durbin Watson**

Daerah	Keterangan
$DW < 0,525$	Autokorelasi positif
$0,525 \leq DW < 2,016$	Tanpa kesimpulan/inconclusive
$2,016 \leq DW < 1,984$	Non Autokorelasi
$1,984 \leq DW < 3,475$	Tanpa kesimpulan/inconclusive
$DW \geq 3,475$	Autokorelasi negative

**Sumber : data Durbin Watson**

Sedangkan nilai Durbin Watson dari perhitungan  $DW = 1,361$ , dimana nilai ini terletak daerah  $0,525 \leq DW < 2,016$  atau berada pada daerah Tanpa kesimpulan/inconclusive, sehingga dapat bahwa regresi tanpa kesimpulan.

## 3. Pengujian adanya Heteroskedastisitas

Metode yang dipakai untuk mengetahui adanya Heteroskedastisitas adalah dengan uji Rank Spearman atau *Spearman Rho*. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 3. Korelasi antara variabel bebas dengan Residual (error)**

Variabel	Korelasi	Sig
Jumlah Penduduk (X1)	- 0,79	0,829
Jumlah Wajib Pajak (X2)	- 0,91	0,803
Pendapatan Perkapita (X3)	- 0,79	0,829

**Sumber : Data diolah**

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa , regresi bebas dari Heterokedastisitas. Dari hasil pengujian ini dan pendeteksian adanya asumsi-asumsi klasik regresi diatas dapat disimpulkan bahwa regresi sudah tidak mengandung indikator-indikator yang bias.

## Hasil Perhitungan Regresi Berganda

### Analisis Regresi

Perhitungan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh diantara variabel bebas dan variabel terikat, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Linier Berganda dengan Menggunakan Program SPSS**

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Std. Error	<sup>t</sup> hitung	<sup>r</sup> parsial
Jumlah Penduduk (X1)	190,941	62,836	3,039	0,779
Jumlah Wajib Pajak (X2)	-2448,202	714,032	-3,429	-0,814
Pendapatan Perkapita (X3)	7,623	3,735	1,945	0,622
Variabel Terikat : Penerimaan PBB				
Konstanta : 13490681,52				
Koefisien Korelasi (R) : 0,795				
Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) : 0,891				
<sup>t</sup> tabel : 2,447				

**Sumber : Data diolah**

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh persamaan regresi Linier Berganda sebagai berikut :

$$Y = 13490681,52 + 190,94 X_1 - 2448,202 X_2 + 7,623 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas , maka dapat dijelaskan melalui penjelasan berikut :

$b_0$  = konstanta = 13490681,52

Menunjukkan besarnya pengaruh faktor lain terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila variabel bebas bernilai konstan, maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurun sebesar Rp.13490681,52 juta.

$b_1$  = koefisien regresi untuk  $X_1$  = 190,941

Menunjukkan besarnya pengaruh variabel Jumlah Penduduk ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila variabel Jumlah Penduduk meningkat 1 orang, maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan naik sebesar Rp.190,941 juta dengan asumsi variabel  $X_2$  dan  $X_3$  konstan atau sama dengan 0.

$b_2$  = koefisien regresi untuk  $X_2$  = -2448,202

Menunjukkan besarnya pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila variabel Jumlah Wajib Pajak meningkat 1 orang, maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan naik sebesar – Rp.2448,202 juta dengan asumsi variabel  $X_1$  dan  $X_3$  konstan atau sama dengan 0.

$b_3$  = koefisien regresi untuk  $X_3$  = 7,623

Menunjukkan besarnya pengaruh variabel Pendapatan Perkapita ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila variabel Pendapatan Perkapita meningkat 1 orang, maka Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan naik sebesar Rp.7,623 juta dengan asumsi variabel  $X_1$  dan  $X_2$  konstan atau sama dengan 0.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Koefisien Korelasi (R)

Besarnya  $R^2$  (koefisien determinasi) = 0,795 nilai ini menunjukkan kemampuan variabel terikat dalam mempengaruhi variabel bebas adalah sebesar 0,795 yang berarti bahwa, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) mampu dijelaskan oleh variasi variabel Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak dan Pendapatan Perkapita, hingga sebesar 79,5%. Sedangkan sisanya sebesar 20,5% dijelaskan oleh variabel lain.

Sedangkan besarnya koefisien korelasi berganda (R) = 0,891, ini berarti menunjukkan bahwa, hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat.

#### Pengujian Hipotesis

##### Uji Hipotesis Secara Simultan

Hasil perhitungan *Analysis of Variance* dengan program SPSS tersaji pada tabel 5 berikut ini :

**Tabel 5. : Analisis Varian (ANOVA)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	1E+016	3	3.606E+015	7.742	.017 <sup>a</sup>
Residual	3E+015	6	4.658E+014		
Total	1E+016	9			

a. Predictor: (Constan), Pendapatan, Perkapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Wajib Pajak

b. Dependent variabel: Penerimaan PBB

Sumber : Data diolah

##### Uji Hipotesis (Uji F)

Berdasarkan perhitungan menunjukkan  $F$  hitung  $7,742 \geq F$  tabel  $4,757$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti secara simultan bahwa, Jumlah Penduduk ( $X_1$ ), Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ ) dan Pendapatan Perkapita ( $X_3$ ), berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel pengikat. Ini berarti Hipotesis yang diajukan oleh penulis telah terbukti kebenarannya.

### Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Hasil perhitungan pengaruh secara parsial antara Variabel Jumlah Penduduk (X1) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) diperoleh t hitung = 3,039, sedangkan t tabel = 2,447 pada df = 6 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, karena t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga secara parsial jumlah penduduk (X1) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Sedangkan Nilai Koefisien Determinasi Parsial ( $R^2$ ) untuk Jumlah Penduduk sebesar  $0,779^2 = 0,6068$  yang berarti dapat menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mampu dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk hingga 60,68%. Sedangkan sisanya sebesar 39,32% dijelaskan oleh faktor lain.

Hasil perhitungan pengaruh secara parsial antara variabel Jumlah Wajib Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) diperoleh t hitung = - 3,429, sedangkan t tabel = 2,447 ada df = 6 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Karena t hitung - 3,429 < t tabel 2,447, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga secara parsial Jumlah Wajib Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Nilai Koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) parsial untuk Jumlah Wajib Pajak sebesar  $-0,814^2 = -0,6625$  yang berarti dapat menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak Terhadap variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar - 66,25%. Sedangkan sisanya sebesar 33,75% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Hasil perhitungan pengaruh secara parsial antara variabel Pendapatan Perkapita (X3), terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) peroleh t hitung = 1,945, sedangkan t tabel = 2,447 pada df = 6 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Karena t hitung 1,945 < t tabel 2,447, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga secara parsial Pendapatan Perkapita (X3) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Sedangkan Nilai Koefisien Determinasi Parsial ( $R^2$ ) untuk Jumlah Penduduk sebesar  $0,622^2 = 0,3868$  yang berarti dapat menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Perkapita hingga 38,68%. Sedangkan sisanya sebesar 61,32% dijelaskan oleh faktor lain.

Dari ketiga variabel bebas tersebut diatas, maka variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah variabel Pendapatan Perkapita (X3), karena variabel ini memiliki koefisien regresi yang distandarkan (*standardized coefficients*) sebesar 1,467 lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien regresi yang distandarkan dari dua variabel bebas lainnya.

### Pembahasan

Dari pengujian hipotesis dengan Uji F dinyatakan bahwa secara simultan bahwa Jumlah Penduduk (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2) dan Pendapatan Perkapita (X3), berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dan dari pengujian hipotesis dengan uji t dinyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2) dan Pendapatan Perkapita (X3) berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Dan variabel Jumlah Wajib Pajak (X2), tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Sedangkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,795 = yang berarti bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), mampu dijelaskan oleh variasi variabel Penduduk (X1), Jumlah Wajib Pajak (X2) dan Pendapatan Perkapita (X3), hingga sebesar 79,5%. Sedangkan sisanya 20,5% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan besarnya koefisien regresi korelasi berganda ( $R$ ) = 0,891, ini berarti menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sangat kuat.

Dari pengujian hipotesis secara parsial dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y), karena semakin banyak Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidoarjo (X1), berarti semakin banyak pula Jumlah Penduduk (X1) di Kabupaten Sidoarjo yang akan menjadi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo (Y) akan meningkat.

Dari pengujian hipotesis secara parsial dinyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak (X2), tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo (Y), hal tersebut terjadi mungkin karena kurangnya perhatian dari Pemerintah kepada masyarakat untuk menegaskan kembali betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta kemungkinan kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo, terhadap masalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari pengujian hipotesis secara parsial dinyatakan bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo (Y), karena semakin banyak jumlah pendapatan perkapita di Kabupaten Sidoarjo (X3), maka tingkat kemakmuran di Kabupaten Sidoarjo akan meningkat dan akan berdampak pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) yang akan terus meningkat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara simultan bahwa, jumlah penduduk (X1), jumlah wajib pajak (X2) dan pendapatan perkapita (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Secara parsial jumlah penduduk (X1) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).
- c. Secara parsial jumlah wajib pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).
- d. Secara parsial jumlah pendapatan perkapita (X3) berpengaruh signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
- e. Variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah variabel pendapatan perkapita (X3).

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis :

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hendaknya meningkatkan Penerimaan Pajak dari sektor lain, seperti dari sektor Pajak, Pariwisata, dan lain-lain. Dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hendaknya meningkatkan tingkat pendapatan perkapita penduduk, serta menekan laju jumlah wajib pajak.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan kebijakan moneter, agar tingkat inflasi stabil, maka daya beli masyarakat akan meningkat.
3. Untuk penelitian selanjutnya tentang masalah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya menambah faktor-faktor lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, dan Dadang Solihin, 2005, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hidayati, Nur, dan Supriyati, 2008, *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol.7 No.1, Hal 41-50.
- Istiqomah, Mu'minatus, Shoclichah, 2005, *Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik*, Jurnal Logos Vol.3 no.1 Juli 2005.
- Mardiasmo, 2005, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 2008, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.
- Resmi, Siti 2008, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, 2006, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Singgih, 2005, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sasana, Hadi, 2005, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus di Kabupaten Banyumas*, Dinamika Pembangunan, Vol.2 no.1 Pengaruh Model hal 19-29.
- Siahaan, Marihot, 2005, *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, 2005, *Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interpretasi Hasil Pengolahan Data*, Edisi Revisi.
- Syofyan, Syofrin, 2006, *Sistem Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem yang Kondusif)*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 3 Nomor 4 , Hal 28-34.
- Thoyib, M, 2006, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1 No.1, 2008, Hal 1-5.
- Undang-Undang Nomor 12, 2004. *Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-Undang Nomor 32, 2004. *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33, 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Winarno, Budi, 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Presindo.
- Artikel harian *JAWA POS*, 24 Februari 2010, halaman 41.